

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN EVALUASI

PROYEK STRATEGIS NASIONAL (Pro-SN) DAERAH **PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026**

Kondisi Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026

Mencakup 5 (lima) Klaster Pro-SN Daerah:
Pengentasan Kemiskinan • Ketahanan Pangan • Kesehatan untuk Semua
Perluasan Akses Pendidikan • Pertumbuhan Ekonomi

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Strategis Nasional (Pro-SN) merupakan program-program prioritas Pemerintah Pusat yang penetapannya diarahkan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional dan didorong pelaksanaannya secara sinergis oleh Pemerintah Daerah melalui pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 5 (lima) kluster Pro-SN Daerah yang menjadi fokus evaluasi, yaitu: (1) Pengentasan Kemiskinan; (2) Ketahanan Pangan; (3) Kesehatan untuk Semua; (4) Perluasan Akses Pendidikan; dan (5) Pertumbuhan Ekonomi.

Sebagai instrumen pengendalian pembangunan daerah, pelaksanaan Pro-SN wajib dievaluasi secara berkala setiap triwulan untuk memastikan kesesuaian antara target yang direncanakan dalam RKPD dengan realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang dicapai oleh Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab. Laporan ini disusun untuk menyajikan hasil Evaluasi Pro-SN Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 untuk kondisi sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun 2026, sebagai bahan pengendalian, evaluasi, dan pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mempercepat capaian target Pro-SN pada triwulan-triwulan berikutnya.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2030;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan gambaran objektif mengenai kemajuan pelaksanaan Pro-SN Daerah pada Triwulan II Tahun 2026. Adapun tujuan penyusunan laporan adalah:

7. Mengukur tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan pelaksanaan 5 (lima) Pro-SN Daerah Provinsi NTT sampai dengan Triwulan II Tahun 2026;
8. Mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan Pro-SN Daerah;
9. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah percepatan (akselerasi) pelaksanaan Pro-SN pada triwulan berikutnya.

1.4 Ruang Lingkup

Evaluasi ini mencakup seluruh sub kegiatan pada dokumen RKPD Tahun 2026 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang teridentifikasi mendukung pencapaian 5 (lima) Pro-SN Daerah, dengan total pagu anggaran pendukung sebesar Rp 567.793.963.993 atau setara 10,50% dari total belanja APBD Provinsi NTT Tahun 2026 sebesar Rp 5.407.304.209.581. Evaluasi dilakukan terhadap capaian kinerja fisik (indikator sub kegiatan) dan realisasi keuangan (serapan anggaran) untuk periode Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026 (kumulatif Semester I), dengan melibatkan 10 SKPD lintas urusan pemerintahan.

1.5 Metodologi dan Indikator Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan metode desk evaluation berbasis data Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan laporan realisasi triwulanan yang diinput oleh SKPD penanggung jawab. Indikator pokok yang digunakan dalam evaluasi ini adalah:

- Realisasi Keuangan (%): rasio antara realisasi anggaran kumulatif Triwulan I–II terhadap pagu/target anggaran RKPD Tahun 2026 pada masing-masing sub kegiatan.
- Capaian Kinerja (%): rasio antara realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan terhadap target kinerja RKPD Tahun 2026.
- Rasio Efisiensi: perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi keuangan. Rasio > 1 mengindikasikan capaian kinerja fisik/output berjalan lebih cepat dibanding penyerapan anggaran (efisien secara nominal, namun perlu ditelusuri konsistensi datanya); rasio ≈ 1 mengindikasikan keselarasan antara kinerja dan keuangan; sedangkan rasio yang sangat tinggi pada nilai keuangan yang sangat rendah (seperti pada kasus Pro-SN Pengentasan Kemiskinan) justru menjadi sinyal kewaspadaan (redflag), bukan capaian yang sesungguhnya efisien.
- Keterisian Indikator Sub Kegiatan (%): proporsi jumlah sub kegiatan yang datanya (capaian indikator) telah dilaporkan/terisi oleh SKPD dibandingkan total sub kegiatan pendukung Pro-SN, sebagai ukuran kepatuhan dan kelengkapan pelaporan kinerja.

1.6 Sistematika Laporan

Laporan disusun dengan sistematika: Bab I Pendahuluan; Bab II Evaluasi Program Strategis Nasional (Pro-SN) Daerah, memuat rekapitulasi dan analisis masing-masing dari 5 (lima) Pro-SN; Bab III Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat; serta Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II EVALUASI PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (Pro-SN) DAERAH

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pro-SN

Secara keseluruhan, kelima Pro-SN Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh anggaran senilai Rp 567.793.963.993, atau 10,50% dari total APBD Provinsi NTT Tahun 2026 sebesar Rp 5.407.304.209.581. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi keuangan kumulatif baru mencapai Rp 26.677.766.352 atau setara 4.70%, jauh di bawah target ideal serapan semesteran (idealnya berkisar 40–50% pada akhir Triwulan II). Sementara itu, capaian kinerja fisik tercatat 28.15%, dengan rasio efisiensi 5.99. Rekapitulasi lengkap disajikan pada tabel berikut.

No	Pro-SN	Pagu (Rp)	Prop. (%)	Realisasi Keu. (Rp)	Real. Keu. (%)	Capaian Kinerja (%)	Rasio Efisiensi
1	Pengentasan Kemiskinan	113.520.588.960	2.10	67.437.663	0.06	20.00	336.67
2	Ketahanan Pangan	18.605.260.936	0.34	2.017.740.693	10.85	48.09	4.43
3	Kesehatan untuk Semua	431.366.710.101	7.98	24.078.788.730	5.58	17.36	3.11
4	Perluasan Akses Pendidikan	12.696.243.716	0.23	1.282.237.280	10.10	47.62	4.72
5	Pertumbuhan Ekonomi	224.832.036	0.00	82.552.536	36.72	0.00	0.00
	Nilai Pro-SN (Total)	567.793.963.993	10.50	26.677.766.352	4.70	28.15	5.99

Sumber: Rekapitulasi Evaluasi Pro-SN pada RKPD Provinsi NTT, diolah, Triwulan II Tahun 2026.

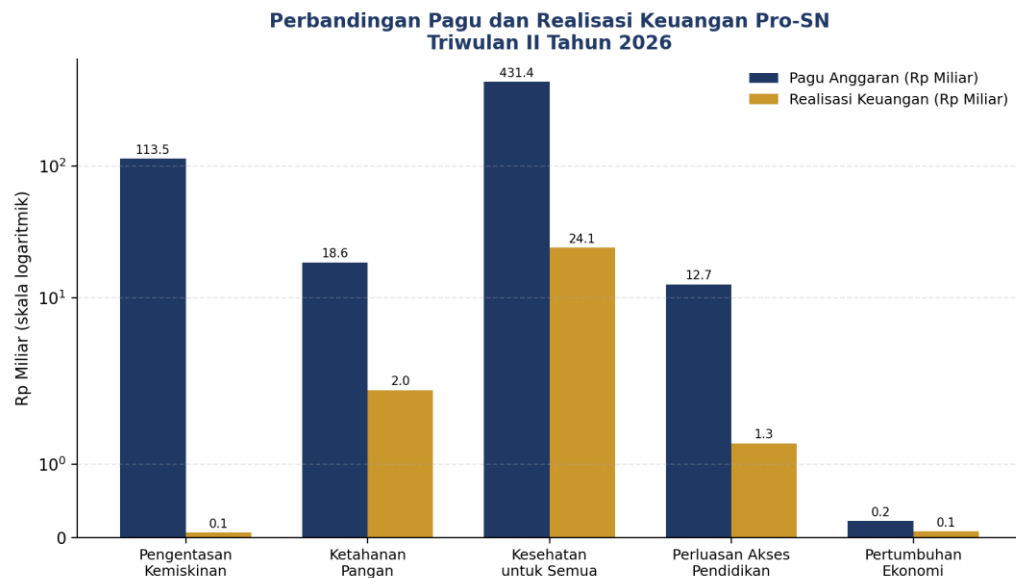
Dari sisi kelengkapan pelaporan, tingkat keterisian indikator sub kegiatan pendukung Pro-SN secara keseluruhan mencapai 92.50% (37 dari 40 indikator sub kegiatan unik), yang melibatkan 10 SKPD pada 11 bidang urusan dan 38 sub kegiatan. Rincian per Pro-SN adalah sebagai berikut.

No	Pro-SN	SKPD	Bidang Urusan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Terisi	Keterisian (%)
1	Pengentasan Kemiskinan	3	3	5	5	5	100.00
2	Ketahanan Pangan	4	3	16	17	16	94.12
3	Kesehatan untuk Semua	5	5	11	12	12	100.00
4	Perluasan Akses Pendidikan	3	3	7	7	7	100.00
5	Pertumbuhan Ekonomi	3	3	3	3	1	33.33
	Nilai Pro-SN (Total Unik)	10	11	38	40	37	92.50

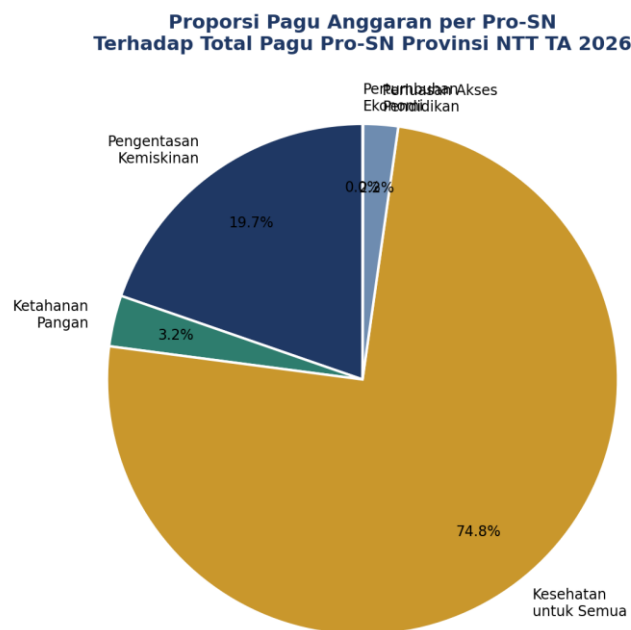
Sumber: Rekapitulasi Evaluasi Pro-SN pada RKPD Provinsi NTT, diolah, Triwulan II Tahun 2026.

2.2 Grafik Perbandingan Antar Pro-SN

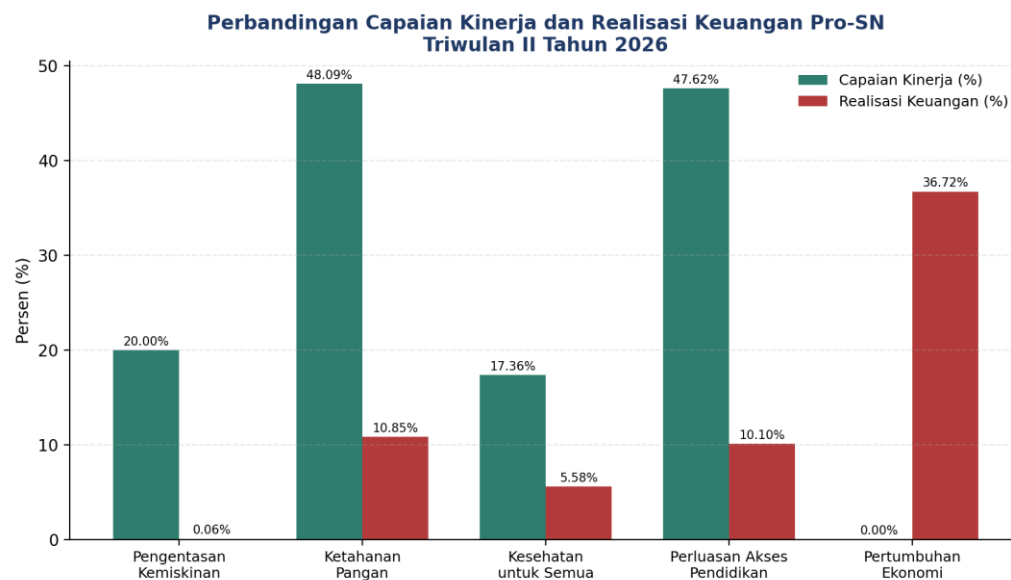
Untuk memperjelas pola dan kesenjangan pelaksanaan antar Pro-SN, berikut disajikan grafik perbandingan dari empat sudut pandang: besaran pagu terhadap realisasi keuangan, proporsi pagu, perbandingan capaian kinerja dengan realisasi keuangan, dan rasio efisiensi.



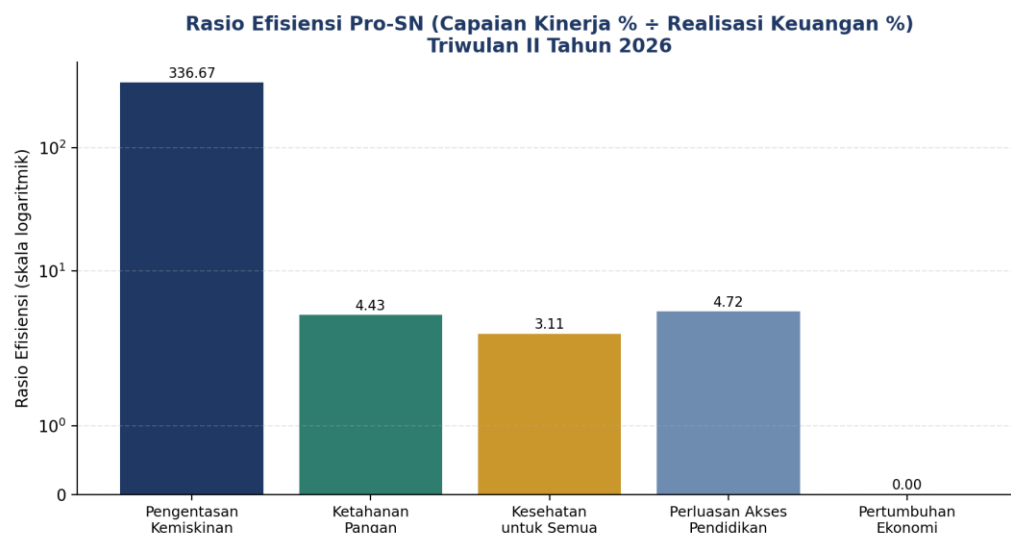
Grafik 2.1 Perbandingan Pagu dan Realisasi Keuangan Antar Pro-SN (Rp Miliar, skala logaritmik)



Grafik 2.2 Proporsi Pagu Anggaran per Pro-SN terhadap Total Pagu Pro-SN



Grafik 2.3 Perbandingan Capaian Kinerja (%) dan Realisasi Keuangan (%) Antar Pro-SN



Grafik 2.4 Rasio Efisiensi Antar Pro-SN (skala logaritmik)

Grafik 2.1 dan 2.2 menunjukkan kesenjangan besar antara skala anggaran dan realisasi: Pro-SN Kesehatan untuk Semua memiliki pagu terbesar (78% dari total pagu Pro-SN secara proporsional dalam grafik pai di atas) namun realisasi keuangannya jauh tertinggal dari besaran pagunya, sementara Pro-SN Pertumbuhan Ekonomi yang berpagu paling kecil justru mencatatkan persentase realisasi keuangan tertinggi (36,72%). Grafik 2.3 memperlihatkan bahwa hanya Pro-SN Ketahanan Pangan dan Perluasan Akses Pendidikan yang capaian kinerjanya mendekati separuh target (masing-masing 48,09% dan 47,62%), sedangkan Pro-SN Pertumbuhan Ekonomi belum mencatatkan capaian kinerja sama sekali (0%) meskipun realisasi keuangannya relatif tinggi. Grafik 2.4 menyoroti anomali pada Pro-SN Pengentasan Kemiskinan, dengan rasio efisiensi 336,67 — bukan indikasi efisiensi yang sesungguhnya, melainkan sinyal bahwa capaian kinerja (20%) dilaporkan jauh melampaui realisasi keuangan (0,06%) yang hampir nihil, sehingga perlu ditelusuri konsistensi pelaporannya (dibahas lebih lanjut pada Bab III).

2.3 Pengentasan Kemiskinan

Pagu	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keu.	% Capaian Kinerja	Rasio Efisiensi
113.520.588.960	67.437.663	0.06%	20.00%	336.67

Pro-SN Pengentasan Kemiskinan didukung oleh 5 sub kegiatan pada 3 SKPD (Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dengan pagu sebesar Rp 113.520.588.960 atau 2.10% dari total pagu Pro-SN. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi keuangan tercatat Rp 67.437.663 (0.06%) dengan capaian kinerja 20.00% dan tingkat keterisian indikator sub kegiatan 100.00%. Dari 15 sub kegiatan detail yang teridentifikasi pada dokumen RKPD, sebanyak 5 sub kegiatan telah mencatatkan realisasi keuangan (>0%) dan 10 sub kegiatan masih 0% (belum ada pencairan anggaran) sampai dengan Triwulan II.

Rincian Tema/Kegiatan Pendukung

Tema/Kegiatan Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. (%)
Pembangunan 3 Juta Rumah	112.699.004.960	50.817.663	0.05
Penanggulangan Kemiskinan (Optimalisasi Data & Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)	760.200.000	400.000	0.21
Sekolah Rakyat	140.384.000	15.400.000	11.68

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Pro-SN Pengentasan Kemiskinan Provinsi NTT, Triwulan II Tahun 2026 (diolah).

Rekapitulasi per Perangkat Daerah (SKPD): Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel berikut menyajikan rincian target dan capaian pada level Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah (SKPD) pengampu, sebagai basis pengendalian teknis lebih lanjut.

Dinas Sosial | Pagu: Rp 839.200.000 | Realisasi: Rp 3.020.000 (0.36%) | 4 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL › Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator: Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	12	0	0,00	561.200.000	0	0,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL › Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator: Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	22	0	0,00	120.000.000	220.000	0,18
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL › Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Indikator: Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin (Kab/Kota)	12	0	0,00	79.000.000	1.400.000	1,77
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL › Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Indikator: Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin (Kab/Kota)	12	0	0,00	79.000.000	1.400.000	1,77

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Pagu: Rp 61.384.000 | Realisasi: Rp 15.000.000 (24.44%) | 2 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN › Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Indikator: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya (Unit)	0	0	0,00	0	0	0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) › Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Indikator: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	12	12	100,00	61.384.000	15.000.000	24,44

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pagu: Rp 112.699.004.960 | Realisasi: Rp 50.817.663 (0,05%) | 2 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN › Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Indikator: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	9	0	0,00	112.699.004.960	50.817.663	0,05
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN › Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi Indikator: Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	0	0	0,00	0	0	0,00

Narasi Analisis

Anggaran Pro-SN ini didominasi (99,3%) oleh sub kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana pada Dinas PUPR senilai Rp112,7 miliar, namun realisasi keuangannya baru mencapai 0,05%, sehingga menyeret capaian keuangan keseluruhan Pro-SN ke angka 0,06% — capaian keuangan terendah di antara seluruh Pro-SN.

2.4 Ketahanan Pangan

Pagu	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keu.	% Capaian Kinerja	Rasio Efisiensi
18.605.260.936	2.017.740.693	10.85%	48.09%	4.43

Pro-SN Ketahanan Pangan didukung oleh 16 sub kegiatan pada 4 SKPD (Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Peternakan), dengan pagu sebesar Rp 18.605.260.936 atau 0.34% dari total pagu Pro-SN. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi keuangan tercatat Rp 2.017.740.693 (10.85%) dengan capaian kinerja 48.09% dan tingkat keterisian indikator sub kegiatan 94.12%. Dari 32 sub kegiatan detail yang teridentifikasi pada dokumen RKPD, sebanyak 11 sub kegiatan telah mencatatkan realisasi keuangan (>0%) dan 21 sub kegiatan masih 0% (belum ada pencairan anggaran) sampai dengan Triwulan II.

Rincian Tema/Kegiatan Pendukung

Tema/Kegiatan Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. (%)
Kampung Nelayan Merah Putih	8.211.512.998	361.000	0.14
Pangan Akuatik	6.261.984.408	151.289.875	26.92
Swasembada Pangan (Irigasi Mendukung Swasembada Pangan)	3.377.431.000	8.940.000	7.02
Mencetak & Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan)	837.238.508	36.912.525	11.36
Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	0	0	0.00

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Pro-SN Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Triwulan II Tahun 2026 (diolah).

Rekapitulasi per Perangkat Daerah (SKPD): Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel berikut menyajikan rincian target dan capaian pada level Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah (SKPD) pengampu, sebagai basis pengendalian teknis lebih lanjut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pagu: Rp 3.377.431.000 | Realisasi: Rp 236.940.000 (7.02%) | 2 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) › Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	5	0	0,00	3.377.431.000	236.940.000	7,02
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) › Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	8	0	0,00	0	0	0,00

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Pagu: Rp 0 | Realisasi: Rp 0 (0.00%) | 2 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN › Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Indikator: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	0	0	0,00	0	0	0,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN › Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Indikator: Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan (Ha)	0	0	0,00	0	0	0,00

Dinas Peternakan | Pagu: Rp 837.238.508 | Realisasi: Rp 95.072.427 (11.36%) | 1 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN › Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Indikator: Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	4	1	25,00	837.238.508	95.072.427	11,36

Dinas Kelautan dan Perikanan | Pagu: Rp 14.473.497.406 | Realisasi: Rp 1.697.185.766 (11.73%) | 14 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL › Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Indikator: Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	1403855.43	701928,02	50,00	98.439.700	0	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL › Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam Indikator: Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam (Kelompok)	1	0	0,00	0	0	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP › Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator: Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	28	2	7,14	46.028.300	13.570.200	29,48
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP › Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator: Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	100	0	0,00	2.500.141.900	749.759.250	29,99
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP › Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator: Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	12	6	50,00	37.400.000	7.470.100	19,97
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP › Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil Indikator: Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil (Persentase)	700	100	14,29	82.905.978	11.457.500	13,82
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP › Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Indikator: Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	4	4	100,00	238.200.000	38.534.375	16,18
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA › Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut Indikator: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	1	0	0,00	0	0	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA › Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	2	200,00	0	0	0,00
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN › Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Indikator: Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan (Hari Operasi)	9	3	33,33	154.328.850	7.799.791	5,05
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN › Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Indikator: Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang	53	20	37,74	221.208.900	7.766.500	3,51

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
	diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)						
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN › Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing Indikator: Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (Kegiatan)	1	3	300,00	2.883.330.780	849.370.550	29,46
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP › Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil Indikator: Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil (Persentase)	700	100	14,29	82.905.978	11.457.500	13,82
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP › Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Indikator: Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	4	0	0,00	8.128.607.020	0	0,00

Narasi Analisis

Meski memiliki jumlah sub kegiatan pendukung terbanyak (16 sub kegiatan dari 4 SKPD lintas sektor kelautan-perikanan, pertanian, dan PUPR), realisasi keuangan Ketahanan Pangan baru 10,85% dengan kontributor utama justru dari sub kegiatan Pangan Akuatik pada Dinas Kelautan dan Perikanan (26,92%), sementara Kampung Nelayan Merah Putih — sub kegiatan berpagu terbesar kedua — baru terealisasi 0,14%.

2.5 Kesehatan untuk Semua

Pagu	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keu.	% Capaian Kinerja	Rasio Efisiensi
431.366.710.101	24.078.788.730	5.58%	17.36%	3.11

Pro-SN Kesehatan untuk Semua didukung oleh 11 sub kegiatan pada 5 SKPD (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan), dengan pagu sebesar Rp 431.366.710.101 atau 7.98% dari total pagu Pro-SN. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi keuangan tercatat Rp 24.078.788.730 (5.58%) dengan capaian kinerja 17.36% dan tingkat keterisian indikator sub kegiatan 100.00%. Dari 21 sub kegiatan detail yang teridentifikasi pada dokumen RKPD, sebanyak 7 sub kegiatan telah mencatatkan realisasi keuangan (>0%) dan 14 sub kegiatan masih 0% (belum ada pencairan anggaran) sampai dengan Triwulan II.

Rincian Tema/Kegiatan Pendukung

Tema/Kegiatan Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. (%)
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	99.147.471.200	23.779.238.000	23.98
Pemeriksaan Kesehatan Gratis	110.868.367.118	23.783.818.000	21.45
Stunting (Pencegahan & Percepatan Penurunan)	316.812.520.563	0	0.09
Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kab/Kota	4.042.775.220	0	0.00
Penuntasan TBC	120.000.000	0	0.18

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Pro-SN Kesehatan untuk Semua Provinsi NTT, Triwulan II Tahun 2026 (diolah).

Rekapitulasi per Perangkat Daerah (SKPD): Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel berikut menyajikan rincian target dan capaian pada level Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah (SKPD) pengampu, sebagai basis pengendalian teknis lebih lanjut.

Dinas Kesehatan | Pagu: Rp 526.624.823.558 | Realisasi: Rp 47.832.518.712 (9.08%) | 9 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT › Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	2	1	50,00	555.952.800	0	0,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT › Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	3	1	33,33	5.537.340.976	0	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI › Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	24	6	25,00	306.551.916.244	269.862.712	0,09
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT › Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	20	10	50,00	11.243.943.118	4.980.000	0,04
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT › Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	2	1	50,00	555.952.800	0	0,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT › Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	0	0,00	99.068.471.200	23.778.838.000	24,00

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT › Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	0	0,00	99.068.471.200	23.778.838.000	24,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT › Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Rumah Sakit Indikator: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	2	1	50,00	106.437.000	0	0,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN › Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1030	0	0,00	3.936.338.220	0	0,00

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Pagu: Rp 0 | Realisasi: Rp 0 (0.00%) | 1 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT › Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	1	0	0,00	0	0	0,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | Pagu: Rp 98.524.460 | Realisasi: Rp 23.488.018 (23.84%) | 1 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) › Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Indikator: Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Laporan)	1	0	0,00	98.524.460	23.488.018	23,84

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Pagu: Rp 0 | Realisasi: Rp 0 (0.00%) | 3 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN › Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator: Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN › Penyelenggaraan Pengelolaan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator: Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0	0,00

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi							
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN › Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator: Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0	0,00

Dinas Sosial | Pagu: Rp 199.000.000 | Realisasi: Rp 1.620.000 (0.81%) | 2 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL › Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Indikator: Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin (Kab/Kota)	12	0	0,00	79.000.000	1.400.000	1,77
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL › Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator: Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	22	0	0,00	120.000.000	220.000	0,18

Narasi Analisis

Pro-SN dengan pagu terbesar (Rp431,4 miliar, 7,98% dari total pagu Pro-SN) ini timpang secara internal: tema Stunting menyerap Rp316,8 miliar (73,4% dari pagu Kesehatan) namun realisasinya nyaris nihil (0,09%), sedangkan realisasi riil justru berasal dari JKN dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang bersifat rutin/klaim layanan. Ketimpangan ini menahan capaian keuangan keseluruhan pada 5,58%.

2.6 Perluasan Akses Pendidikan

Pagu	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keu.	% Capaian Kinerja	Rasio Efisiensi
12.696.243.716	1.282.237.280	10.10%	47.62%	4.72

Pro-SN Perluasan Akses Pendidikan didukung oleh 7 sub kegiatan pada 3 SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan), dengan pagu sebesar Rp 12.696.243.716 atau 0.23% dari total pagu Pro-SN. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi keuangan tercatat Rp 1.282.237.280 (10.10%) dengan capaian kinerja 47.62% dan tingkat keterisian indikator sub kegiatan 100.00%. Dari 10 sub kegiatan detail yang teridentifikasi pada dokumen RKPD, sebanyak 3 sub kegiatan telah mencatatkan realisasi keuangan (>0%) dan 7 sub kegiatan masih 0% (belum ada pencairan anggaran) sampai dengan Triwulan II.

Rincian Tema/Kegiatan Pendukung

Tema/Kegiatan Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. (%)
Makan Bergizi Gratis	8.831.424.016	99.611.300	1.13
Pembangunan & Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	2.811.528.300	22.664.000	0.81
Pembangunan & Revitalisasi SMA Unggul Garuda / Digitalisasi Pembelajaran	1.464.043.660	410.202.730	28.02

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Pro-SN Perluasan Akses Pendidikan Provinsi NTT, Triwulan II Tahun 2026 (diolah).

Rekapitulasi per Perangkat Daerah (SKPD): Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel berikut menyajikan rincian target dan capaian pada level Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah (SKPD) pengampu, sebagai basis pengendalian teknis lebih lanjut.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pagu: Rp 4.686.324.220 | Realisasi: Rp 432.866.730 (9.24%) | 6 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN › Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	0	0,00	311.930.300	0	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN › Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	0	0,00	2.499.598.000	22.664.000	0,91
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN › Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	44	0	0,00	410.752.260	0	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN › Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	200	0	0,00	1.053.291.400	410.202.730	38,94
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN › Pengelolaan Pendidikan Khusus	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	282	0	0,00	0	0	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN › Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	44	0	0,00	410.752.260	0	0,00

Dinas Kesehatan | Pagu: Rp 5.537.340.976 | Realisasi: Rp 0 (0.00%) | 1 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT › Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	3	1	33,33	5.537.340.976	0	0,00

Dinas Kelautan dan Perikanan | Pagu: Rp 2.883.330.780 | Realisasi: Rp 849.370.550 (29.46%) | 1 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN › Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing Indikator: Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (Kegiatan)	1	3	300,00	2.883.330.780	849.370.550	29,46

Narasi Analisis

Kinerja fisik Pro-SN Pendidikan relatif baik (47,62%), tertinggi kedua setelah Ketahanan Pangan, ditopang tema Digitalisasi Pembelajaran (SMA Unggul Garuda) yang telah terealisasi 28,02% dari pagunya. Namun tema Makan Bergizi Gratis — pagu terbesar pada Pro-SN ini (Rp8,83 miliar, 69,6% dari total pagu Pendidikan) — baru terealisasi sekitar 1,1%, dan Pembangunan/Revitalisasi Pendidikan Dasar-Menengah baru 0,81%.

2.7 Pertumbuhan Ekonomi

Pagu	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keu.	% Capaian Kinerja	Rasio Efisiensi
224.832.036	82.552.536	36.72%	0.00%	0.00

Pro-SN Pertumbuhan Ekonomi didukung oleh 3 sub kegiatan pada 3 SKPD (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan), dengan pagu sebesar Rp 224.832.036 atau 0.00% dari total pagu Pro-SN. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi keuangan tercatat Rp 82.552.536 (36.72%) dengan capaian kinerja 0.00% dan tingkat keterisian indikator sub kegiatan 33.33%. Dari 10 sub kegiatan detail yang teridentifikasi pada dokumen RKPD, sebanyak 1 sub kegiatan telah mencatatkan realisasi keuangan (>0%) dan 9 sub kegiatan masih 0% (belum ada pencairan anggaran) sampai dengan Triwulan II.

Rincian Tema/Kegiatan Pendukung

Tema/Kegiatan Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. (%)
Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	224.832.036	82.552.536	36.72
Pengendalian Inflasi	0	0	0.00
Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	0	0	0.00

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Pro-SN Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT, Triwulan II Tahun 2026 (diolah).

Rekapitulasi per Perangkat Daerah (SKPD): Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel berikut menyajikan rincian target dan capaian pada level Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah (SKPD) pengampu, sebagai basis pengendalian teknis lebih lanjut.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Pagu: Rp 0 | Realisasi: Rp 0 (0.00%) | 2 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT › Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi Indikator: Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi (Laporan)	1	0	0,00	0	0	0,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT › Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi Indikator: Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	0	0	0,00	0	0	0,00

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | Pagu: Rp 224.832.036 | Realisasi: Rp 82.552.536 (36.72%) | 2 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI › Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Indikator: Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	200	0	0,00	224.832.036	82.552.536	36,72
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI › Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator: Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (Unit Usaha)	0	0	0,00	0	0	0,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pagu: Rp 0 | Realisasi: Rp 0 (0.00%) | 1 sub kegiatan

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Real. Keu. (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL › Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Indikator: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1	0	0,00	0	0	0,00

Narasi Analisis

Pro-SN Pertumbuhan Ekonomi memiliki pagu paling kecil (Rp224,8 juta, praktis 0,00% dari total pagu Pro-SN) dan seluruhnya bertumpu pada satu sub kegiatan, yaitu Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) pada Dinas Koperasi, UKM, dengan realisasi keuangan tertinggi di antara seluruh Pro-SN (36,72%). Namun capaian kinerja fisiknya tercatat 0% dan keterisian indikator sub kegiatan hanya 33,33% (1 dari 3 sub kegiatan telah memiliki nilai capaian indikator), mengindikasikan lemahnya kelengkapan pelaporan kinerja meskipun pencairan anggaran berjalan.

BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi keuangan pada Bab II, teridentifikasi sejumlah faktor pendorong yang mendukung pencapaian Pro-SN, serta faktor penghambat yang menjadi kendala utama pelaksanaan Pro-SN Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

3.1 Faktor Pendorong

- Adanya sub kegiatan bersifat rutin dan berbasis klaim layanan (seperti Jaminan Kesehatan Nasional dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada Pro-SN Kesehatan untuk Semua) yang secara alami memiliki pola pencairan lebih cepat karena mekanisme pembiayaannya mengikuti jumlah layanan yang telah diberikan kepada masyarakat, sehingga realisasi keuangannya relatif lebih tinggi (masing-masing 23,98% dan 21,45%) dibanding sub kegiatan berbasis konstruksi/pengadaan.
- Komitmen politik dan prioritas nasional yang kuat terhadap program-program unggulan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Digitalisasi Pembelajaran (SMA Unggul Garuda), yang tercermin dari realisasi keuangan yang relatif tinggi masing-masing 36,72% dan 28,02% pada triwulan berjalan, menunjukkan kesiapan pelaksanaan (readiness) SKPD terkait relatif lebih matang.
- Tingkat keterisian indikator sub kegiatan yang tinggi (rata-rata 92,5%) pada sebagian besar Pro-SN mengindikasikan komitmen SKPD dalam pelaporan capaian kinerja telah cukup baik, sehingga data evaluasi ini dapat menjadi basis pengendalian yang relatif andal, kecuali pada Pro-SN Pertumbuhan Ekonomi.
- Keterlibatan lintas sektor/lintas SKPD (10 SKPD pada 11 bidang urusan) menunjukkan pengintegrasian Pro-SN ke dalam perencanaan daerah telah dilakukan secara multidimensi, membuka ruang kolaborasi dan sinergi program antar perangkat daerah.

3.2 Faktor Penghambat

- Realisasi keuangan keseluruhan Pro-SN pada Triwulan II baru mencapai 4,70%, jauh di bawah pola serapan anggaran yang ideal pada semester pertama tahun anggaran (idealnya 30–50%). Hal ini mengindikasikan keterlambatan sistemik dalam proses pengadaan barang/jasa, pencairan, dan/atau pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan pada sebagian besar sub kegiatan pendukung Pro-SN.
- Ketimpangan besar antara pagu dan realisasi terkonsentrasi pada sub kegiatan berskala besar yang bersifat pembangunan fisik/infrastruktur, seperti Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana (pagu Rp112,7 miliar, realisasi 0,05%) pada Pro-SN Pengentasan Kemiskinan, tema Stunting (pagu Rp316,8 miliar, realisasi 0,09%) pada Pro-SN Kesehatan, dan Kampung Nelayan Merah Putih (pagu Rp8,2 miliar, realisasi 0,14%) pada Pro-SN Ketahanan Pangan — mengindikasikan hambatan pada tahap perencanaan teknis, proses lelang/tender, atau kesiapan lahan dan dokumen pendukung konstruksi.
- Sebanyak 61 dari 88 ($\pm 69\%$) sub kegiatan detail lintas kelima Pro-SN masih mencatatkan realisasi keuangan 0% sampai dengan Triwulan II, menunjukkan bahwa mayoritas kegiatan pendukung Pro-SN belum mulai berjalan secara signifikan pada semester pertama.

- Ditemukan inkonsistensi antara capaian kinerja fisik dan realisasi keuangan pada beberapa Pro-SN, terutama Pro-SN Pengentasan Kemiskinan (capaian kinerja 20% berbanding realisasi keuangan hanya 0,06%, rasio efisiensi 336,67) dan Pro-SN Pertumbuhan Ekonomi (realisasi keuangan 36,72% namun capaian kinerja 0%). Kondisi ini mengindikasikan permasalahan pada mekanisme pengukuran/pelaporan indikator kinerja sub kegiatan yang belum selaras dengan realisasi anggaran riil, sehingga validitas datanya perlu diverifikasi lebih lanjut oleh SKPD terkait.
- Tingkat keterisian indikator sub kegiatan pada Pro-SN Pertumbuhan Ekonomi baru mencapai 33,33% (1 dari 3 sub kegiatan), mengindikasikan lemahnya kepatuhan pelaporan kinerja pada Pro-SN ini sehingga menyulitkan proses evaluasi yang akurat.
- Sebagian pagu bernilai Rp0 (tanpa alokasi anggaran definitif) ditemukan pada banyak sub kegiatan pendukung — seperti pada tema Pengendalian Inflasi dan Pelestarian Lingkungan pada Pro-SN Pertumbuhan Ekonomi serta sejumlah sub kegiatan pada Pro-SN Ketahanan Pangan — yang mengindikasikan sub kegiatan tersebut belum didukung anggaran definitif dalam RKPD/DPA Tahun 2026 meskipun telah ditetapkan sebagai bagian dari kluster Pro-SN.

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

10. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan Pro-SN Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara agregat masih berada pada tahap awal implementasi, dengan realisasi keuangan kumulatif sebesar 4,70% dari total pagu Rp567,79 miliar dan capaian kinerja sebesar 28,15%, yang keduanya berada di bawah target serapan ideal semester pertama.
11. Terdapat kesenjangan signifikan antar Pro-SN: Pro-SN Pertumbuhan Ekonomi mencatatkan realisasi keuangan tertinggi (36,72%) meski berpagu paling kecil, sedangkan Pro-SN Pengentasan Kemiskinan mencatatkan realisasi keuangan terendah (0,06%) meski berpagu terbesar kedua (Rp113,52 miliar), yang didominasi oleh satu sub kegiatan pembangunan rumah senilai Rp112,7 miliar yang praktis belum terealisasi.
12. Pro-SN Ketahanan Pangan dan Perluasan Akses Pendidikan menunjukkan kinerja relatif lebih baik dibanding tiga Pro-SN lainnya, dengan capaian kinerja masing-masing 48,09% dan 47,62%, meskipun realisasi keuangannya juga masih di bawah 11%.
13. Ditemukan indikasi inkonsistensi data capaian kinerja dan realisasi keuangan pada Pro-SN Pengentasan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi yang memerlukan verifikasi lebih lanjut, serta tingkat keterisian indikator kinerja yang masih rendah pada Pro-SN Pertumbuhan Ekonomi (33,33%).
14. Faktor penghambat utama bersumber dari lambannya proses pengadaan dan pelaksanaan fisik pada sub kegiatan berskala besar, khususnya pada tema Stunting, Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, dan Kampung Nelayan Merah Putih, yang secara kumulatif menyerap porsi pagu terbesar namun realisasinya hampir nihil.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi Umum (Lintas Pro-SN)

15. Pemerintah Provinsi NTT melalui Bapperida perlu segera melaksanakan rapat evaluasi dan pengendalian (rakordal) khusus Pro-SN dengan seluruh SKPD penanggung jawab untuk mengidentifikasi kendala teknis pada setiap sub kegiatan berpagu besar yang realisasinya masih 0%, dan menyusun rencana aksi percepatan (action plan) untuk Triwulan III dan IV Tahun 2026.
16. Mendorong percepatan proses pengadaan barang/jasa (lelang/tender) pada sub kegiatan konstruksi dan infrastruktur besar (Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, Kampung Nelayan Merah Putih, Rumah Sakit Lengkap Berkualitas, dan intervensi fisik penurunan Stunting) agar tidak menumpuk pada triwulan akhir tahun anggaran (fenomena "backloading") yang berisiko menurunkan kualitas pelaksanaan dan menyebabkan SILPA (siswa lebih perhitungan anggaran).
17. Melakukan verifikasi dan sinkronisasi metode pengukuran capaian kinerja dengan realisasi keuangan pada seluruh sub kegiatan, khususnya pada Pro-SN dengan rasio efisiensi ekstrem (Pengentasan Kemiskinan) dan capaian kinerja 0% meski realisasi keuangan berjalan (Pertumbuhan Ekonomi), agar data evaluasi triwulan berikutnya lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

18. Meningkatkan kepatuhan pelaporan capaian indikator sub kegiatan oleh seluruh SKPD, dengan target keterisian indikator 100% pada setiap periode evaluasi triwulanan, disertai penetapan pagu definitif bagi seluruh sub kegiatan pendukung Pro-SN yang saat ini masih bernilai Rp0.
19. Mengoptimalkan peran Tim Pengendali Pro-SN Daerah untuk melakukan monitoring bulanan (bukan hanya triwulanan) terhadap sub kegiatan berisiko tinggi (pagu besar dengan realisasi rendah), agar deviasi dapat terdeteksi dan dimitigasi lebih dini.

Rekomendasi Spesifik per Pro-SN

- Pengentasan Kemiskinan: percepatan proses konstruksi/rehabilitasi pada sub kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana melalui evaluasi kesiapan lahan, dokumen perencanaan teknis, dan proses tender, mengingat sub kegiatan ini menyerap 99,3% dari total pagu Pro-SN.
- Ketahanan Pangan: mempercepat realisasi Kampung Nelayan Merah Putih yang baru terealisasi 0,14%, serta mereplikasi pola percepatan yang telah berhasil pada sub kegiatan Pangan Akuatik (realisasi 26,92%) ke sub kegiatan sejenis lainnya.
- Kesehatan untuk Semua: memprioritaskan akselerasi intervensi fisik dan non-fisik penurunan Stunting yang menyerap porsi pagu terbesar (73,4% dari pagu Pro-SN Kesehatan) namun realisasinya nyaris nihil (0,09%), termasuk penyediaan bahan tambahan pangan dan sarana pendukung layanan gizi.
- Perluasan Akses Pendidikan: mengevaluasi mekanisme penyaluran anggaran Program Makan Bergizi Gratis dan Pembangunan/Revitalisasi Pendidikan Dasar-Menengah yang realisasinya masih di bawah 2%, sambil mempertahankan capaian positif pada Digitalisasi Pembelajaran.
- Pertumbuhan Ekonomi: melengkapi penetapan pagu definitif dan target kinerja pada tema Pengendalian Inflasi serta Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah yang saat ini belum memiliki alokasi anggaran, serta memperbaiki kelengkapan pelaporan indikator kinerja sub kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar capaian kinerja fisiknya dapat terukur, sejalan dengan realisasi keuangannya yang telah berjalan baik (36,72%).

Demikian Laporan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (Pro-SN) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 untuk kondisi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ini disusun sebagai bahan pengendalian dan pengambilan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.